



Dana Kelurahan Harus Tepat Sasaran

YOGYA, TRIBUN - Komisi A DPRD DIY melakukan pengawasan persiapan penggunaan dana kelurahan di Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, Selasa (8/1). Hadirnya dana kelurahan ini dinilai membawa harapan besar mampu menyelesaikan problem-problem di Kota Yogyakarta selama ini terkait dengan kemiskinan dan pengangguran.

Dari informasi yang diperoleh, dana kelurahan dari pemerintah pusat total sebesar Rp3 triliun, sejumlah Rp15.882.345.000 di antaranya akan mengalir ke-45 kelurahan di Kota Yogyakarta. Diperkirakan dana itu bisa mulai dicairkan pada Maret 2019. Prinsipnya dana tersebut harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto menjelaskan, penggunaan dana tersebut dapat dilakukan dengan meng-



Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptakan lapangan kerja apalagi DIY memiliki PR (pekerjaan rumah) kemiskinan masih di angka 12,03 persen.

Eko Suwanto

Ketua Komisi A DPRD DIY

gatakan urusan substansi tidak boleh dihambat oleh administrasi. "Ini rumus ke-

gunakan tiga rumus. Di antaranya, penggunaan dana itu dipastikan mampu dorong penciptaan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan perbaikan sarana prasarana. "Setiap rupiah yang dikeluarkan harus mampu menciptakan lapangan kerja apalagi DIY memiliki PR (pekerjaan rumah) kemiskinan masih di angka 12,03 persen," kata Eko, Selasa (8/1).

Saat forum dialog, menanggapi adanya kekhawatiran dana kelurahan seperti dana desa, Eko Suwanto men-

● ke
halaman 15

Dana Kelurahan

● Sambungan Hal 9

bijakan publik. Permendagri sudah tegas. Peruntukan dana kelurahan lebih detail dari dana desa. Baru kali ini ada Permendagri teknis, saya kira bagus. Rumusnya adalah laksanakan yang diperintahkan," kata Wakil Ketua DPD PDIP DIY ini.

Eko juga mendorong Pemda DIY serta Pemkot Yogyakarta untuk sigap memproses penyalangan dokumen perencanaannya agar dana kelurahan segera cair. Supaya tidak terulang pengalaman pahit pada saat awal-awal turunnya dana kestimewaan atau danais.

"Untuk mengawal anggaran ini, kita punya komitmen yang sama dengan pemda untuk menentang segala bentuk korupsi. Kita minta inspektorat mengawal perencanaan dan pengalokasian dana kelurahan ini. Kita dukung camat dan lurah laksanakan dana kelurahan sesuai peraturan perundang-undangan," urainya.

Adapun, cara yang dilakukannya adalah uang tersebut harus berputar di kelurahan dan jangan sampai keluar. Diharapkan dana kelurahan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jika ada program dan kegiatan, bel-

anjanya harus di wilayah kelurahan.

"Kami minta Pemerintah Kota Yogyakarta membuat kebijakan untuk memprioritaskan potensi lokal. Pembangunan sarana dan prasarana gunakan tenaga kerja dari kelurahan setempat. Demikian juga saat belanja barang, sehingga menambah pertumbuhan ekonomi. Duitnya harus mengalir lagi ke masyarakat. Itu kuncinya," papar politisi PDI Perjuangan ini.

Eko menyebut, dana kelurahan merupakan buah perjuangan dari asosiasi DPRD Kota se-Indonesia. Pihaknya bersyukur setelah ada dana desa di DIY, kelurahan se-Kota Yogya dapat masing-masing akan mendapatkan dana Rp352 juta dan satu lagi Kelurahan Wates di Kulon Progo.

Lurah Suryatmajan, Ari Suryani berharap nantinya dana kelurahan nantinya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Fasilitas yang selama ini belum terfasilitasi bisa terfasilitasi," katanya.

Konsultasi

Kepala Biro Tata Pemerintah (Tapem) Setda DIY, Maladi mengatakan, untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai teknis penggunaan dana kelurahan, jajarannya bersama Komisi A DPRD DIY akan konsultasi

ke Kemendagri. Tujuannya supaya memperoleh gambaran secara lebih jelas dan detail, sehingga gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bisa menindaklanjuti kebijakan tersebut.

"Setelah konsultasi kami akan tindak lanjuti dengan kebijakan Pak Gubernur. Angkanya sudah fixed. Tahun ini yang dapat semua kelurahan di Kota Yogyakarta dan Kelurahan Wates Kulon Progo. Untuk awal ini, mari dana yang sudah tersedia di APBN ini dikelola dengan baik," kata Maladi.

Kabag Pemerintahan dan Kesra Pemkot Yogyakarta, Octo Noor Arafat mengatakan, pihaknya sudah mempersiapkan hal-hal teknis maupun administrasi terkait pencairan dana kelurahan. "Harapan kami, jika dana kelurahan masuk jangan sampai ada *overlap* kegiatan. Dana kelurahan perlu memperhatikan program dan usulan yang belum terakomodir dari Musrenbang 2018. Bappeda yang mengarahkan," ujarnya.

Mantan Camat Danurejan itu mengingatkan jangan sampai PNS terjebak administrasi sehingga tugas ke masyarakat berkurang. "Masyarakat juga perlu kita pikirkan. Jangan sampai ruah pelayanan terputus hanya karena terjebak administrasi," kata dia. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Tapem dan Kesra	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 07 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005